

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### 4.1 Kesimpulan

Sabah sebagai negara bagian Malaysia dengan area perkebunan kelapa sawit terbesar kedua setelah Malaysia sangat mengandalkan tenaga kerja yang sebagian besar merupakan pekerja migran yang berasal dari Indonesia untuk bekerja pada sektor yang ditinggalkan penduduk Malaysia yaitu sektor 3D akibat dari kurangnya tenaga kerja. Meskipun peluang kerja menguntungkan dari sisi PMI, mereka datang ke Sabah tidak hanya diri sendiri namun juga dengan keluarganya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, hal tersebut bertentangan dengan *Malaysian Immigration Act 1154A* terdapat peraturan bahwa pekerja pemilik PLKS dengan gaji dibawah 5000 RM tidak diperbolehkan untuk membawa sanak keluarganya. Banyak PMI yang mengabaikan peraturan tersebut, hal ini membawa akibat dan pengaruh buruk untuk anak - anak PMI di Sabah.

Pemerintah Indonesia menyadari tantangan anak - anak PMI yang tidak bisa memiliki dokumen ke imigrasian esensial dan legal seperti akta kelahiran, paspor, dan juga visa akibat dari orang tua yang tidak memiliki dan tidak bisa mengurus dokumen anak secara resmi dikarenakan statusnya. Terjadinya eksploitasi anak akibat ladang - ladang tidak memiliki tenaga kerja yang cukup sehingga terdapat anak - anak yang bekerja secara tersamar. Terbatasnya akses pendidikan akibat dari ketentuan yang diberikan oleh pemerintah Malaysia dimana untuk dapat bersekolah harus memenuhi berbagai persyaratan. Pola pikir orang tua terhadap pentingnya bekerja dibandingkan menempuh pendidikan memperparah masalah ini. Tantangan ini dijadikan acuan bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan intervensi dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak pendidikan anak-anak PMI sesuai dengan *Conventions on the Rights of the Child*.

Dalam mengupayakan perwujudan pendidikan bagi anak-anak PMI pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif untuk memenuhi hak pendidikan anak dengan cara melakukan kesepakatan untuk melakukan pengiriman guru Indonesia ke HUMANA untuk melakukan observasi dan pengajaran dan mendirikan Sekolah Indonesia Luar Negeri yang berbasis kurikulum Indonesia yaitu Sekolah Indonesia Kota Kinabalu agar anak - anak PMI baik di kota maupun di ladang dapat menempuh pendidikan yang setara dengan anak - anak di Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari keterbatasan dari pusat pembelajaran tersebut

sehingga upaya lanjutan untuk mendirikan pendidikan alternatif kembali dilakukan. Diplomasi yang dilakukan Indonesia membawa hasil dengan adanya penandatanganan *Joint Statement* dalam *Annual Consultation* 8 antar kedua negara di Lombok pada 20 Oktober 2011 maka *community learning center* dapat secara resmi berdiri.

Upaya yang pemerintah Indonesia lakukan melalui adanya CLC ini telah berhasil memberikan solusi dan dampak yang signifikan bagi keberlangsungan pendidikan anak - anak serta pemenuhan hak anak atas pendidikannya. Pemerintah Indonesia menjalankan kewajibannya untuk menyediakan (*Availability*) edukasi yang layak bagi anak - anak PMI yang pada dasarnya kesulitan dalam mendapatkan pendidikan dengan cara melakukan kerjasama tidak hanya dengan pemerintah Malaysia namun juga dengan pemilik ladang sawit dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Sabah (JPNS) untuk melakukan pendirian CLC di ladang, memberikan dana sebesar 40,000,000 - 50,000,000 RM untuk memfasilitasi kebutuhan dalam proses pengajaran bagi anak - anak PMI, melakukan perekrutan tenaga pendidik yang berkompeten agar anak - anak bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas serta menyediakan beasiswa GEMA CITA repatriasi untuk tingkat SMA (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADik) untuk pendidikan berkelanjutan bagi anak - anak PMI. Dalam pemenuhan kewajiban untuk memberikan akses (*Accessibility*) pendidikan pemerintah berhasil menyediakan akses pendidikan bagi anak - anak yang terpinggirkan dalam hal ini anak - anak PMI yang berada di ladang dengan mengupayakan agar pendidikan dapat terjangkau oleh anak - anak, pendirian CLC dan TKB yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya berhasil menunjukkan peningkatan jumlah murid SD & SMP secara konsisten setiap tahunnya. pemenuhan kewajiban pemerintah dalam mewujudkan skema penerimaan (*acceptability*) adalah dengan memberikan konten pendidikan yang relevan juga dilakukan dengan cara mengadakan smart parenting dengan orang tua murid setiap tahunnya agar pendidikan tidak hanya dapat diterima oleh anak namun orang tuanya juga bisa menerima eksistensi CLC sebagai pendidikan alternatif bagi anak, kemudian dengan menerapkan kurikulum yang berbasis Indonesia agar anak - anak dapat mendapatkan konten pendidikan selayaknya anak - anak yang berada di sekolah formal Indonesia serta menyesuaikan sistem pembelajaran dengan kebutuhan anak - anak PMI. pemenuhan kewajiban dalam konteks adaptabilitas (*adaptability*) adalah dengan menyadari bahwa anak - anak PMI memiliki latar belakang dan kondisi yang unik sehingga pendidikan inklusif diwujudkan melalui pendirian CLC agar anak - anak bisa berada di lingkungan belajar yang nyaman dan tidak diskriminatif.

Inisiatif diplomasi yang terus dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan Konvensi Hak Asasi Manusia PBB, terutama dalam memastikan akses

pendidikan bagi anak-anak PMI adalah bukti komitmen pemerintah sebagai pelindung terhadap hak asasi manusia. Melalui pendirian lembaga pendidikan non-formal *Community Learning Center*, anak-anak PMI di perkebunan kelapa sawit Sabah menerima peluang pendidikan yang setara. Pencapaian ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hak atas pendidikan: ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan adaptabilitas. Ini mencerminkan dedikasi Indonesia untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak PMI, mendorong perkembangan mereka, dan memastikan hak mereka terlindungi. Walaupun terdapat beberapa hal yang memerlukan peningkatan, melalui adanya peran pemerintah yang signifikan serta langkah - langkah yang tepat, anak - anak PMI di ladang sawit Sabah dapat memiliki kesempatan untuk mengasah potensi serta wawasannya sehingga mereka bisa membangun masa depan yang lebih baik.

